

SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRATISASI

Rofiq Nurhadi

FKIP, Universitas Muhammadiyah Purworejo
rofiq_nurhadi@yahoo.co.id

Abstrak

Pesantren sebagai lembaga pendidikan elitis yang diorientasikan untuk melahirkan kelompok elit (pemimpin) agama cenderung melahirkan problem demokratisasi. Melalui kajian literatur dengan pendekatan filosofis mengenai gaya kepemimpinan, kultur dan model pembelajaran di pesantren dapat disimpulkan bahwa problem utama bagi upaya demokratisasi sistem pendidikan pesantren adalah terletak pada dua faktor. Pertama adalah faktor teologis. Secara teologis agama yang dijadikan kerangka bagi pelaksanaan pendidikan pesantren cenderung melahirkan pendekatan indoktrinasi serta cenderung memunculkan mandat dan emosi keagamaan seperti otoriterisme dan pengukuhan identitas komunal. Kedua adalah faktor kultural yang diwarisinya dari lembaga semacam ini sebelum mengalami islamisasi. Besarnya otoritas kyai dan keluarganya menandai karakteristik kultur pesantren. Terhadap yang pertama maka pendekatan indoktrinasi perlu diimbangi dengan pendekatan-pendekatan yang menekankan pada proses. Untuk itu perlu dibedakan antara agama sebagai wahyu yang bersifat mutlak dan agama sebagai produk sejarah yang bersifat relatif. Kemutlakan hanya ada dalam ajaran Tuhan itu sendiri dan tidak pada tafsir yang bersifat historis tentang itu yang harus selalu bersifat relatif, terbuka dan plural. Adapun terhadap yang kedua demokratisasi dapat dibangun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pemiliknya dalam pengelolaan pesantren.

Kata Kunci: sistem pendidikan pesantren, dan demokratisasi

PENDAHULUAN

Demokratisasi pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dari demokratisasi bangsa, sebab hakekat pendidikan adalah proses pembudayaan. Bahkan berkembangnya kebudayaan itu adalah karena pendidikan. Oleh karenanya budaya demokrasi sangat dipengaruhi oleh pola pelaksanaan pendidikan bangsa. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh John Dewey bahwa pendidikan adalah sarana *par excellent* yang menumbuhkan kehidupan demokrasi (Dewey, 1965: 81-99).

Di Indonesia demokrasi telah menjadi tuntutan atau kebijakan sistem pemerintahan dan sistem pembangunan nasional sejak negara ini didirikan. Oleh

karena sistem pendidikan nasional merupakan sub sistem dari sistem pembangunan nasional, maka demokratisasi dalam bidang pendidikan berarti juga merupakan satu bagian dari upaya mensukseskan program dari sistem pembangunan nasional, yaitu demokratisasi bangsa. Persoalannya adalah apakah pendidikan nasional sebagai suatu sistem telah mendukung demokratisasi?.

Sebagai suatu sistem, pendidikan nasional memiliki beberapa sub sistem, diantaranya adalah sistem pendidikan Islam yang di dalamnya ada sistem pendidikan pesantren (Mastuhu, 1994: 2). Sistem pendidikan pesantren sebagai sub sistem dari sistem pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang *archaic* Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah ada semenjak Islam belum masuk di bumi nusantara. Dari sini penting mengkaji pesantren dari sudut pandang demokratisasinya. Karena disamping ia adalah bagian dari sub sistem pendidikan nasional maka ia adalah lembaga pendidikan yang telah mengakar dan tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa. Oleh karena itu tentu ia mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai dan membentuk karakter bangsa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan sebagai kerangka analisis terhadap berbagai data tertulis mengenai pesantren di Indonesia baik dari sisi gaya kepemimpinan, kultur maupun model pembelajarannya. Data penelitian ini diperoleh melalui sumber literer, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primernya adalah karya-karya mengenai gaya kepemimpinan, kultur dan model pembelajaran di pesantren. Diantaranya adalah "Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren)" yang ditulis oleh Mastuhu, "Tradisi Pendidikan Politik di Pesantren (Tinjauan Historis)" karya KH Sahal Mahfudz, "Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas IPTEK" karya Abdul Munir Mulkhan, "Pesantren Sebagai Subkultur" karya Abdurrahman Wahid dan "Tradisi Pesantren" karya Zamakhsyari Dhofier. Sedangkan sumber sekundernya adalah semua bahan yang dapat mendukung analisis penelitian ini.

Setelah data yang diperoleh dari kedua sumber tersebut dikumpulkan dan diseleksi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induksi dan deduksi. Data dari sumber primer dan sekunder tentang gaya kepemimpinan, kultur maupun model pembelajaran pesantren dikumpulkan satu persatu kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. Kemudian data tentang visi dan misi pesantren yang masih bersifat umum dan analisa dan dipahami secara rinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Hubungan antara Islam dan Demokrasi

Apabila dilihat dari stratifikasinya maka sistem pendidikan pesantren adalah bagian dari sub sistem pendidikan Islam. Sistem Pendidikan Islam adalah, (1) sistem pendidikan yang diimplementasikan karena didorong oleh hasrat untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, (2) sistem pendidikan yang mengajarkan ajaran Islam dan (3) sistem pendidikan Islam yang meliputi kedua hal tersebut (Fadjar, 1998: 1). Dari batasan ini jelas bahwa nilai-nilai dan atau ajaran Islam-lah yang dijadikan kerangka bagi pelaksanaan dan terselenggaranya sistem pendidikan Islam. Apabila Islam sebagai sebuah agama yang dijadikan kerangka bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan Islam maka sudah barang tentu menjadi penting melihat demokratisasi sistem pendidikan Islam ini dari sudut pandang hubungan antara Islam dengan demokrasi.

Pada dasarnya hubungan Islam dengan demokrasi tidak jauh berbeda dengan hubungan agama-agama lain dengan demokrasi. Karena secara teologis semua agama mempunyai konsep kedaulatan Tuhan. Menurut Komaruddin Hidayat hubungan antara agama dan demokrasi dapat dirumuskan dalam tiga model. *Pertama*, hubungan yang bersifat negatif (agama versus demokrasi/konflikual). Pendapat ini didukung oleh fakta, alasan filosofis dan teologis. Secara faktual bahwa secara historis sosiologis agama telah digunakan oleh para penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan politik kelompok. Dan secara filosofis keterikatan pada doktrin agama, terlebih jika klaim agama terhadap pemeluknya begitu total, maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga akan

menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Adapun secara teologis bahwa agama selalu mencari rujukan pada Tuhan. Padahal Tuhan tidak hadir secara empiris sementara demokrasi adalah persoalan empiris dan bersifat dinamis, sehingga hanya ketika agama disingkirkan, maka manusia akan lebih leluasa, mandiri dan jernih berbicara soal demokrasi.

Kedua, sekularisasi politik. Teori ini mempunyai banyak nuansa, yaitu bisa hanya pada level formal kelembagaan, bisa juga pada proses sosial dan bisa juga sampai pada level kesadaran metafisis bahkan tidak menutup kemungkinan ketiganya berlangsung sekaligus. Model ini mempunyai asumsi dan bahkan bukti-bukti empiris bahwa sekularisasi politik pada gilirannya malah saling menguntungkan baik bagi perkembangan demokrasi maupun eksistensi agama itu sendiri. Madzab ini berusaha memberikan solusi terhadap realitas mandat dan emosi keagamaan, yang mana masing-masing kelompok ingin menang dengan mengatasnamakan Tuhan.

Ketiga, model Teo-Demokrasi (demokrasi yang memepertimbangkan nilai-nilai transendental). Dalam dataran teologis normatif semua agama, terlebih lagi yang berasal dari tradisi Ibrahim, muncul dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (nilai kemanusiaan). Aktualisasi dari nilai kemanusiaan yang amat substansial dan universal selalu mengasumsikan terwujudnya keadilan dan kemerdekaan yang diyakini sebagai hak-hak asasinya. Dalam konteks ini maka demokrasi dan proses demokratisasi merupakan kondisi niscaya bagi terwujudnya keadilan dan hak kemerdekaan seseorang. Walaupun diyakini bahwa agama itu berasal dari Tuhan, tapi sebenarnya konsep "theokrasi" secara murni itu sebetulnya tidak ada karena dalam pelaksanaannya tetap melibatkan peranan manusia. Kalaupun ada dalam konteks Islam misalnya hanya berumur 23 tahun, yaitu semasa hidup Muhammad saw., sepeninggalnya maka praktis pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam tidak lagi berdasarkan pewahyuan Tuhan secara langsung, melainkan ajaran wahyu yang sudah ditafsirkan oleh para sahabat. Jadi dalam tataran ini agama tidak berbicara tentang sistem melainkan muatan substansial dari spirit dan arah demokrasi. Dalam Islam misalnya bisa dilihat pada doktrinnya yang sangat menekankan pada prinsip keadilan, musyawarah, pemihakan pada kaum tertindas dan

teraniaya (Hidayat, dalam Peldi Taher (ed.), 1994: 192-196). Kalaupun madzab ini juga mengakui bahwa agama cenderung menghalangi proses demokrasi, maka hal ini adalah hanya kecenderungan saja bukan keharusan, yaitu karena memang agama mempunyai kecenderungan untuk melahirkan klaim kebenaran serta melahirkan kelompok elit yang merasa memiliki otoritas atas nama Tuhan. Dan yang demikian ini adalah lebih merupakan mandat dan emosi keagamaan.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Komaruddin Hidayat tersebut, Franz Magnis-Suseno juga berpendapat bahwa kehadiran agama itu akan memberikan dua wacana yaitu; *pertama*, agama dihubungkan dengan kepicikan, kebencian, pertikaian, pembunuhan, huru-hara, perusakan, terorisme dan sebagainya. *Kedua*, agama-agama itu merupakan berkat bagi masyarakat, karena ia diasosiasikan dengan gambaran orang yang berbudi luhur, lapang hatinya, jujur, adil, tidak picik, tidak pendendam, berbelas kasih, berdamai dan sebagainya. (Magnis-Suseno, 1998: 158). Jadi agama itu menyediakan kemungkinan-kemungkinan bagi tertolaknya dan terlaksanakannya demokrasi.

Karena agama menyediakan kemungkinan-kemungkinan bagi tertolaknya dan terlaksanakannya demokrasi, maka hubungan antara agama dengan demokrasi itu bisa bersifat konfliktual atau terjadi ketegangan dan bisa juga bersifat harmonis atau bahkan agama memberi dorongan bagi tumbuh kembangnya demokratisasi dengan ajarannya yang menekankan pada perdamaian, keadilan, permusyawaratan dan pemihakannya pada kaum yang tertindas. Akar dari ketegangan hubungan antara agama dan demokrasi tak lain adalah dikarenakan secara teologis sifat agama senantiasa mencari rujukan pada Tuhan (baca: kedaulatan berada di tangan Tuhan). Karena kedaulatan berada ditangan Tuhan maka kebenaran itu hanya satu (tunggal) yaitu kebenaran Tuhan. Dari sinilah muncul klaim kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan yang dibawa oleh agama tersebut dan untuk mempertahankan idealitas kebenaran tunggal yang diklaim sebagai satu-satunya kebenaran tersebut maka para pemeluk agama senantiasa melakukan upaya pengukuhan identitas komunal.

Kedaulatan Tuhan yang diterjemahkan secara kaku menjadikan permusyawaratan yang merupakan prinsip utama demokrasi mendapat ganjalan.

Begitu juga kebenaran tunggal yang memunculkan klaim kebenaran diantara para pemeluk agama akan menjadi kendala bagi penerimaan pluralitas yang sangat ditekankan dalam demokrasi. Lebih dari itu penguatan identitas komunal yang senantiasa diupayakan oleh para pemeluk agama untuk mempertahankan idealitas kebenaran tunggalnya juga akan menjadi penghalang bagi upaya-upaya demokrasi dalam mengakomodasi perbedaan. Dari sinilah sebenarnya ketegangan hubungan antara agama dan demokrasi itu terjadi.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya resistensi dalam agama pada umumnya dan dalam Islam pada khususnya terhadap demokrasi tentu juga berimbas dalam dunia pendidikan Islam. Implikasi prinsip kedaulatan ada di tangan Tuhan dan kebenaran tunggal adalah diterapkannya pendekatan indoktrinasi dalam pendidikan dan pengajaran. Lebih dari itu, dari segi kepemimpinan maka prinsip ini menjadikan pemimpin sebagai kepanjangan dari kemahakuasaan Tuhan sehingga akan bercorak otoriter doktriner. Selanjutnya klaim kebenaran akan menjadi tantangan bagi pendidikan yang berwacana kebinekaan dan pengembangan kreatifitas. Penguatan identitas komunal yang diupayakan melalui jalur pendidikan akan menjadi tantangan bagi upaya-upaya penerimaan dan pengakomodasian segala macam perbedaan.

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang di bawa oleh demokrasi. Dimana pendidikan yang demokratis akan menekankan pada pendekatan proses (Zakaria, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, NO 026. Tahun Ke-6, Oktober 2000: 482) dan kepemimpinan yang demokratis adalah kepemimpinan yang mencerminkan kepanjangan dari kehendak orang banyak serta pengembalian amanat orang banyak sehingga tidak bercorak otoriter doktriner. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan wacana kebinekaan, menerima perbedaan, mengembangkan kreatifitas dan tidak eksklusif.

Meskipun akses teologis sebagaimana telah diuraikan dapat menjadi penghambat proses demokratisasi dalam sistem pendidikan Islam termasuk sistem pendidikan pesantren, namun sebenarnya ini bukan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan indoktrinasi harus digunakan dalam pendidikan Islam karena dengan pendekatan ini nilai-nilai ajaran

Islam yang telah diyakini kebenarannya tersebut dapat ditanamkan pada anak didik sehingga anak didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun tidak berarti model pendekatan yang menekankan pada proses dan melibatkan *reasoning* tidak dapat diterapkan dalam pendidikan Islam. Memang kebenaran agama itu adalah suatu kebenaran mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar oleh manusia namun tentu saja kebenaran ini sebatas dalam wilayah wahyu ketuhanan. Adapun agama yang berada di wilayah kesejarahan manusia tentu kebenarannya bersifat relatif, seperti kebenaran tafsir dan fiqh. Karena ia tak lain adalah produk pemikiran manusia dalam rangka memberi tafsir atas kebenaran mutlak agama tersebut. Dari sinilah maka pendekatan proses mendapatkan peluang untuk diterapkan.

Untuk itu perlu dibedakan antara Islam sebagai wahyu dan sebagai produk sejarah (Mudzhar, 2002: 19). Kebenaran wahyu adalah mutlak dan tidak boleh ditawar-tawar. Namun apabila wahyu tersebut telah ditafsirkan oleh manusia maka tafsir manusia terhadap wahyu ketuhanan ini telah menjadi produk sejarah manusia yang tentu saja kebenarannya menjadi relatif. Dalam keilmuan Islam klasik kontekstualisasi ajaran Islam ini dikembangkan dalam disiplin Ulumul Hadits, Ulumul Qur'an dan Ulumul Fiqh. Semua ini tak lain adalah upaya manusia untuk memahami atau menafsirkan wahyu ketuhanan. Hal inilah yang perlu dikembangkan agar pendidikan Islam tidak hanya menjadi sebuah upaya penanaman nilai-nilai ajaran Islam yang sangat menonjolkan pendekatan indoktrinasi.

Jadi kemutlakan hanya ada dalam ajaran Tuhan itu sendiri dan tidak pada tafsir yang bersifat historis tentang itu yang harus selalu bersifat relatif, terbuka dan plural. Ketunggalan dan kemutlakan ajaran Tuhan tampil dalam kenyataan sosial secara plural dan dalam wujud yang relatif. Tuhan dan ajaran-Nya tetap diyakini bersifat eksklusif dan mutlak dan bisa tampil berbeda sesuai zaman dan sosial budaya penganutnya sendiri (Mulkhan: 2002: 4). Untuk itu kepatuhan pada syariat harus digabungkan dengan prinsip syura (Magnis Suseno, 1992: 141) Dengan perspektif ini maka pintu pendidikan Islam termasuk Pesantren akan terbuka lebar untuk menerapkan ide-ide demokratisasi baik dalam hal pendekatan pendidikan maupun gaya kepemimpinannya. Karena memang beragama tak lain adalah upaya memberi

tafsir atas Tuhan dan doktrin ketuhanannya.

B. Pesantren Sebagai Subkultur

Menurut Mastuhu (1994: 6-7) pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri dibawah pimpinan kyai atau ulama' dibantu oleh seorang atau beberapa orang ulama' atau para ustadz yang hidup bersama di tengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan, gedung-gedung sekolah atau ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri. Selama 24 jam, dari masa kemasa mereka hidup kolektif antara kyai, ustadz, santri dan para pengasuh pesantren lainnya, sebagai satu keluarga besar. Namun dewasa ini hampir disetiap pesantren terdapat jenis-jenis pendidikan: (1) Pesantren yang hanya mempelajari agama dengan kitab-kitab keagamaan klasik atau "Kitab Kuning" dan berbentuk nonformal, (2) Madrasah (sekolah agama), (3) Sekolah Umum dan beberapa diantaranya (4) Perguruan Tinggi baik Agama maupun Umum. Ketiga jenis pendidikan yang terakhir ini berbentuk formal. Tetapi keempatnya hidup dalam satu kampus pesantren, dan oleh karena itu siswanya biasa disebut santri.

Ciri khas pesantren adalah terletak pada orientasinya untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian (*tafaqquh fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat (Mastuhu, 1994: 3). Hal ini secara historis sangat berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh lembaga ini sejak mengalami islamisasi yaitu selain sebagai lembaga pendidikan ia juga sebagai lembaga dakwah dan sosial keagamaan serta pusat gerakan pengembangan agama Islam (Mastuhu, 1994: 21)

Selain orientasi *tafaqquh fiddin*, karakteristik lain yang sangat mewarnai pesantren adalah melekatnya tradisi lama yang diwarisinya dari lembaga ini sebelum mengalami islamisasi. Sebagaimana telah maklum bahwa lembaga semacam pesantren

ini sebenarnya telah ada semenjak sebelum Islam masuk di Nusantara. Kehadiran Islam hanya memberi warna keislaman pada lembaga yang sebenarnya sudah ada ini (Madjid, 1997: 3), sedangkan struktur-struktur yang ada lebih berorientasi pada warisan yang ada. Melekatnya tradisi lama ini menyebabkan secara umum pesantren-pesantren yang ada mempunyai ciri-ciri tradisionalisme, meskipun ia telah banyak mengadopsi sistem pendidikan modern. (Mahfudz, 2000: 28). Misalnya dari segi kepemimpinan. Apabila dilihat dari model kepemimpinannya, maka ia adalah sebuah model kepemimpinan yang diwarisi dari lembaga ini sebelum ia mengalami islamisasi. Hal ini ditunjukkan dengan betapa besarnya otoritas seorang kyai. Besarnya otoritas ini disebabkan karena kedudukan kyai selain sebagai pengasuh ia juga pemilik pesantren. Kedudukan ini menurut Abdurrahman Wahid secara kultural sama dengan kedudukan para "bangsawan feodal" yang biasa dikenal dengan nama "kanjeng" dipulau Jawa. Ia dianggap memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain disekitarnya dan atas dasar ini hampir mengenai setiap kyai yang ternama beredar legende tentang keampuhannya yang umumnya bersifat magis (Wahid, 1995: 46-47).

Kedudukan yang semacam ini nampak semakin kokoh setelah dilegitimasi oleh agama. Selanjutnya tokoh-tokoh agama alumni pesantren ini dalam sebagian masyarakat kita masih mewarisi kedudukan seperti ini sampai saat ini. Hal ini tentu saja termasuk bagian dari konsekwensi dari tujuan pesantren itu sendiri, dimana ia bertujuan untuk mencetak ulama-ulama yang mampu memahami hukum-hukum Allah dan membentuk nilai-nilai yang islami serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari ulama-ulama ini pula diharapkan nilai-nilai yang islami (hukum-hukum Allah) ditransformasikan dalam kehidupan umat manusia. Dari sinilah lahir kelompok elit (pemimpin) agama yang memiliki otoritas atas nama Allah dan diluar itu ada masyarakat umum yang berhak mendapat bimbingannya. Itulah sebabnya menurut Abdurrahman Wahid bahwa pesantren itu adalah termasuk pendidikan elitis (Wahid, 1995: 48).

Selain segi kepemimpinan maka ciri-ciri tradisionalisme yang lain yang juga masih sangat nampak dapat dilihat misalnya dari segi kurikulum, metode dan pendekatan pendidikannya. Bila dilihat dari segi kurikulumnya menurut Abdul Munir

Mulhan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam masih berhenti hanya memahami produk-produk intelektual tanpa kajian kritis basis methodologinya serta struktural mental fuqoha dan filosof. Dimana kajian keislaman hanya berhenti sibuk menghafalkan qoidah dan mantiq. (Mulhan et. all., 1998: 219) Hal ini disebabkan sistem pendidikan pesantren lebih menitik beratkan pada pembentukan nilai-nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. (Wahid, 1995:52-53)

Dari segi metode pengajaran, bahwa sejak awal para pelajar diharapkan telah menerima Al-Qur'an dan Sunnah sebagai kebenaran mutlak, baru kemudian melanjutkan penjelajahan terhadap sumber-sumber pengetahuan lain (Ashraf, 1996: 75-77). Kemudian dari sisi pendekatannya dalam memahami agama umumnya pesantren cenderung memahaminya secara tekstual dan dalam menerima nilai-nilai agama ditekankan pada tradisi riwayat seperti yang terjadi dalam urutan sanat dalam hadis dan juga tradisi ijazah sebagaimana yang menjadi kebiasaan kaum sufi.

Kultur pesantren sebagaimana telah diuraikan bila dilihat dari sisi demokratisasi tentu kurang menguntungkan. Gaya kepemimpinan yang ditandai dengan besarnya otoritas kyai dapat memunculkan kesenjangan antara kyai dan keluarganya dengan para santri atau masyarakat pada umumnya. Kesenjangan dalam kepemimpinan menjadikan upaya demokratisasi dalam memberdayakan umat (mengembangkan partisipasi umat) kurang kondusif. Materi pelajaran yang lebih menekankan pada ilmu-ilmu produk dan pembentukan nilai-nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan cenderung melahirkan sikap fanatisme sempit dan doktriner. Menurut Abdurrahman Wahid penekanan pesantren pada pembentukan nilai-nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membawa akibat pada kedangkalan tata nilai, sehingga hanya perbuatan-perbuatan lahiriyah belaka yang harus dinilai, dengan sama sekali mengabaikan faktor kedalaman rasa (compassion). Kedangkalan tata nilai ini pada gilirannya menghasilkan sikap hidup yang doktriner, yang menggolongkan manusia hanya kepada dua kelompok belaka, yaitu fihak kita dan fihak lawan. (Wahid, 1995: 52-53).

Kemudian metode dan pendekatan yang bersifat normatif, tekstual dan indoktrinatif akan cenderung melahirkan sikap fanatisme sempit, klaim kebenaran dan

sikap yang kaku (formalitis) yang dapat membentuk sekat-sekat dalam kehidupan yang plural ini. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Amin Abdullah bahwa studi agama yang hanya menggunakan pendekatan normativitas (*fideistic subjectivism*) saja akan memunculkan kecenderungan untuk mempertahankan pemahaman normatif pada agama, mencetak sekat-sekat dalam agama dan klaim kebenaran (Abdullah 1996: 11), padahal demokrasi sangat menghargai keragaman.

C. Prospek Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren

Faktor-faktor penghambat demokratisasi dalam sistem pendidikan pesantren sebagaimana telah diuraikan tidak serta merta mengarahkan pada kesimpulan bahwa sistem pendidikan pesantren kurang bisa digunakan sebagai tempat persemaian demokrasi. Pesantren sebagai sebuah sistem mengalami *continuity and change* dalam rangka mengikuti arus perkembangan. Mastuhu dalam “Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren” telah mengkaji persoalan gaya kepemimpinan dan suksesi kepemimpinan pesantren. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan akan adanya perubahan dalam gaya kepemimpinan pesantren. Yaitu dari jenis karismatik menuju ke rasional, dari otoriter-kebakakan menuju ke diplomatik-partisipatif dan dari *laisser-faire* menuju ke birokratik. Tetapi memang perjalanan perubahan tersebut belum sampai memasuki daerah gaya kepemimpinan yang baru, kecuali perubahan dalam gaya kepemimpinan dari *laisser-faire* ke birokratik, dimana pada beberapa pesantren tampak ketat dengan peraturan tertulis yang telah ditetapkan. Adapun dalam masalah suksesi kepemimpinan atau estafet pergantian kepemimpinan pesantren, terutama pada pesantren milik pribadi, ia cenderung mengikuti pola lama yaitu; pendiri-anak-menantu-cucu-santri senior (Mastuhu, 1994: 79-88).

Selanjutnya penelitian Zamakhsyari Dhofier dalam “Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kyai)”. Dalam penelitiannya ini peneliti melihat adanya kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) dalam tradisi pesantren. Ia tidak mengkontradiktifkan antara tradisionalisme dan modernisme dalam Islam (Dhofier, 1982: 122-126). Dengan cara pandang ini maka tidak dapat dikatakan bahwa tradisionalisme dalam dunia pesantren itu lawan dari modernisme akan tetapi ia

adalah satu kesinambungan dan perubahan.

Adanya *continuity and change* ini mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor dari luar, yaitu faktor perubahan dan perkembangan zaman, namun ini tidak berarti pesantren tidak memiliki potensi dari dalam dirinya sendiri bagi tumbuh dan berkembangnya demokratisasi. Pesantren juga memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan demokratisasi pendidikan. Potensi-potensi itu dapat dilihat misalnya, bila dewasa ini bangsa kita sering membicarakan mengenai inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (*community-based-management / CBM*), maka pesantren sesungguhnya merupakan model *archaic* dari pendidikan tersebut. Pesantren adalah suatu sistem kehidupan yang lahir dan dibesarkan dalam suatu masyarakat. Pesantren telah lahir di dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh sebab itu pesantren sebenarnya dikelola oleh masyarakat yang memilikinya. Meskipun di dalam perkembangannya pengelolaan pesantren banyak ditentukan oleh para kyai sebagai pemiliknya, namun tidak dapat disangkal bahwa kehidupan pesantren telah ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya (Tilaar, 2000: 152). Berpartisipasinya masyarakat dalam memberdayakan dirinya sendiri merupakan syarat utama bagi lahir dan berkembangnya demokrasi.

Kemudian bila dilihat dari metode pengajarannya, pesantren lebih menekankan pada metode bandongan dan sorogan yang bersifat individual. Metode pengajaran yang menekankan pada metode individual adalah lebih sesuai dengan semangat demokrasi. Demokratisnya metode pengajaran ini terletak pada perhatiannya terhadap faktor bakat, minat dan kemampuan individu (Al-Abrasyi, 1970: 6). Berbeda dengan sistem klasikal dengan kurikulum yang standar maka faktor bakat, minat dan kemampuan individu cenderung kurang mendapat perhatian. Akibatnya anak didik yang lebih maju cenderung dirugikan karena potensi yang dimiliki tidak bisa berkembang semaksimal mungkin. Ia terhambat oleh standarisasi kurikulum dalam sistem klasikal tersebut. Adapun anak didik yang berada dibawah rata-rata juga cenderung terus ketinggalan, karena pendidik biasanya mengejar target kurikulum yang telah ditetapkan.

Selain gaya kepemimpinan, pengelolaan dan metode pembelajaran. sumbangan pesantren terhadap demokratisasi adalah doktrin egaliterianisme Islam yang diajarkan di pesantren. Ia merupakan sumber motivasi yang tiada pernah kering bagi dijunjung tingginya harkat dan martabat kemanusiaan seperti perintah menegakkan keadilan, persamaan derajat dan upaya menaburkan kesejahteraan atas hakekat manusia yang berbeda-beda ini. Karena doktrin inilah kiranya dalam sejarahnya pesantren mampu memerankan dirinya sebagai oposisi bagi penguasa yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oposisi bagi pesantren tidak hanya merupakan kekuatan kontrol terhadap praktek kekuasaan tapi juga merupakan kewajiban syari'at dalam rangka menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini bisa dilihat misalnya pada masa penjajahan, pesantren telah menjadi pihak yang beroposisi terhadap pemerintah colonial (Suminto, t.t: 4).

Menurut Azyumardi Azra sejak terjadinya konsolidasi dengan kekuasaan kolonial Belanda, khususnya pada abad 18, ulama dan sekaligus lembaga pendidikan Islam di Jawa melakukan perlawanan membisu (*silent opposition*) terhadap penjajah. Karena merasa tidak berdaya melawan kekuasaan Belanda, para ulama, khususnya di Jawa mereka melakukan distansi dan *keep alooft* terhadap kekuasaan (Azra , 1999: 150-151). Bahkan perkembangan dramatis institusi-institusi pendidikan Islam tradisional itu sendiri didorong oleh semangat perlawanan secara diam (*silent opposition*) terhadap kolonialisme Eropa setelah perlawanan bersenjata yang dilancarkan masyarakat Muslim dilumpuhkan kaum kolonialis. Sedang pada masa kemerdekaan, tema oposisi pesantren tetap tidak berubah yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini direalisasikan dengan semangat jihad dan berkonsentrasi pada pembentukan moral keagamaan. Sebagai contoh adalah partisipasi mereka yang aktif dalam menghancurkan komunisme di tahun 1965-an (Dhofier, 1982: 173) yang mau mencoba untuk merebut kekuasaan dengan cara yang keji. Disamping itu peran pesantren dan kyai dalam memberikan kontrol terhadap pemerintah juga sangat besar. Hal ini bisa dilihat dalam kasus partai-partai politik Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Selain faktor-faktor penghambat, sistem pendidikan pesantren juga memiliki faktor-faktor pendukung demokratisasi. Apabila faktor-faktor penghambat demokratisasi dieliminir, maka faktor-faktor pendukung demokratisasi ini dapat berkembang. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengoptimalkan fungsi kepemimpinan kolektif yang telah dibentuk dalam Yayasan. Kepemimpinan kolektif dapat menekan otoriterianisme dalam kepemimpinan tunggal. Kemudian pendekatan pendidikan yang menekankan isi atau materi diimbangi dengan pendekatan proses, sehingga yang lahir bukan *truth claim* yang mengarah pada fanatisme sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi sebuah gerakan penghapusan keragaman, tetapi mengarah pada tumbuhnya sebuah komitmen yang sehat yang dapat mendukung tercapainya cita-cita ideal dari agama seperti perdamaian, persahabatan, persaudaraan, dan keadilan. Dengan pendekatan yang seimbang ini, penguatan identitas kumunal akan mengarah pada pengembangan peran pesantren sebagai sebuah oposisi yang sehat yang sejalan dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rangka berlomba-lomba untuk mencapai kebajikan, bukan menjadi sebuah gerakan yang menjadi musuh keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Study Agama Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Abrasyi, Mohd. Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Djohar Bahry (penterj.), Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ashraf, Ali, *Horison Baru Pendidikan Islam*, Sori Siregar (penterj.), t.k: Pustaka Firdaus, 1996.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam (Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dewey, John., *Democracy and Education*, New York: Mac Millan, 1965.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai)*, Jakarta: LP3ES, 1982.

- Fadjar, A Malik, *Madrasah Dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1998.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren (Sebuah Potret Perjalanan)*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Magnis Suseno, Franz, dkk., *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: P3M, 1992.
- _____, *Mencari Makna Kebangsaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Mahfudz, K.H. MA Sahal, *Tradisi Pendidikan Politik Di Pesantren (Tinjauan Historis)*, dalam Ismail SM - Abdul Mukti (ed.), *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren)*, Jakarta: INIS, 1994.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam (Dalam Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mulkhan, Abdul Munir, dkk., *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas IPTEK*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Nalar Spiritual Pendidikan (Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam)*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002
- Peldi Taher, Elza (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi (Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru)*, Jakarta; Yayasan Paramadina, 1994.
- Suminto, Aqid, H., *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: Penerbit LP3ES, t.t.
- Wahid, Abdurrahman, *Pesantren Sebagai Subkultur dalam M. Dawam Rahardjo (ed.) , Pesantren dan Pembaharuan*, t.k.: LP3ES, 1995)
- Zakaria, Teuku Ramli, *Pendekatan-pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasi Dalam Pendidikan Budi Pekerti*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No 026 Tahun ke-6, Oktober 2000.